

STRATEGI PENURUNAN *STUNTING* DI KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

Muh Tajul Islam Abadi^{1*)}, Farida Hanum²⁾, Nina Sa'idah Fitriyah³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email tajulplur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penurunan *Stunting* di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Camat Panji, didukung oleh enam informan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penurunan *Stunting* dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif, serta pemanfaatan aplikasi Si Besti untuk pemantauan dan penyebaran informasi. Intervensi spesifik difokuskan pada penyebab langsung seperti kurang gizi, sementara intervensi sensitif menasar faktor tidak langsung seperti sanitasi, air bersih, dan kondisi ekonomi. Strategi kebijakan yang diterapkan meliputi penetapan sasaran program (ibu hamil, balita, remaja, calon pengantin, dan ibu menyusui), pemanfaatan sumber daya (manusia, finansial, dan waktu), karakteristik organisasi yang sesuai dengan masyarakat sasaran, komunikasi efektif antara pelaksana dan penerima manfaat, sikap pelaksana yang responsif terhadap masyarakat, serta dukungan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keseluruhan pendekatan ini terbukti mendukung keberhasilan implementasi program penurunan *Stunting* di wilayah tersebut.

Kata kunci: *Stunting*, Strategi Penurunan, Kecamatan Panji

Abstract

This study aims to analyze Stunting reduction strategies in Panji District, Situbondo Regency. The method used was qualitative research, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. The primary informant in this study was the Panji District Head, supported by six other informants. The results indicate that the Stunting reduction strategy was implemented through an integrated approach that included specific and sensitive interventions, as well as the use of the Si Besti application for monitoring and information dissemination. Specific interventions focused on direct causes such as malnutrition, while sensitive interventions targeted indirect factors such as sanitation, clean water, and economic conditions. The policy strategies implemented included determining program targets (pregnant women, toddlers, adolescents, prospective brides and grooms, and breastfeeding mothers), resource utilization (human, financial, and time), organizational characteristics appropriate to the target community, effective communication between implementers and beneficiaries, responsiveness of implementers to the community, and support from the social, economic, and political environment. This overall approach has been proven to support the successful implementation of the Stunting reduction program in the region.

Keywords: *Stunting, Reduction Strategy, Panji District*

PENDAHULUAN

Menurut WHO, *Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak. Balita *Stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita *Stunting* di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (WHO, 2017). Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia, *Stunting* atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan. *Stunting* merupakan proses kumulatif dan disebabkan oleh asupan zat-zat gizi yang tidak cukup atau penyakit infeksi yang berulang, atau kedua-duanya (Dinkes RI, 2018)

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan dunia dan melestarikan alam serta menjadi kerangka acuan pembangunan negara yang ada di Dunia. Salah satu tujuannya adalah ketahanan pangan dan gizi yang baik. (Sukanti & Faidati, 2021)

Masalah anak pendek (*Stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Penanganan kekurangan gizi pada tingkat global memerlukan upaya yang dimulai dari tingkat nasional masing-masing negara. Pendekatan tersebut dalam mengatasi masalah gizi pada populasi domestik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi malnutrisi seperti yang direncanakan pada *Millenium Development Goals* (MDG) di awal tahun 2000 (Unicef, 2013; Cobham et al, 2013)

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. (Kemenkes, 2018) *Stunting* disebabkan oleh beberapa factor, menurut (Erik et al., 2020). Pola makan yang tidak memenuhi gizi seimbang selama proses kehamilan dan setelah bayi lahir 2. Pola makan anak sejak lahir sampai usia dua tahun 3. Pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 6 bulan 2 4. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) terlalu dini (kurang dari enam bulan).

Penanggulangan *Stunting* perlu tanggung jawab bersama, baik dari Pemerintah ataupun masyarakatnya itu sendiri. *Stunting* dapat berdampak bagi kehidupan dimasa yang akan datang dan bukan hanya berdampak buruk terhadap tumbang kembang anak tetapi juga berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi anak yang baik dalam 1000 hari pertama dan menjaga lingkungan tetap baik bersih dan sehat. Anak *Stunting* penyebab utamanya asupan gizi. Tak satupun penelitian yang mengatakan keturunan memegang faktor yang lebih penting daripada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak. (Kesmas RI, 2018) Masyarakat, umumnya menganggap

pertumbuhan fisik sepenuhnya dipengaruhi faktor keturunan. Pemahaman keliru itu kerap menghambat sosialisasi pencegahan *Stunting* yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya. (Kesmas RI, 2018)

Pencegahan dan penanganan pada anak *Stunting* dilakukan melalui program-program gizi terkait *Stunting* seperti pemberian tablet Fe, promosi ASI eksklusif, promosi makanan pendamping ASI, suplemen taburia, suplemen gizi makro, tata laksana gizi kurang dan gizi buruk, suplementasi vitamin A, promosi garam beryodium, air dan sanitasi, bantuan pangan non tunai, dan pemberian obat cacing. Di samping itu, untuk menangani masalah *Stunting* diperlukan komitmen dari aparat desa setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Pengetahuan aparat desa teraktualisasi seiring bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas pemerintahan desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya suksesnya penanganan masalah *Stunting* secara efektif dan efisien. Menurut penelitian Wulandari (2017) tentang analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menyatakan bahwa aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik untuk menyelesaikan program desa, termasuk masalah kesehatan seperti *Stunting*.

Upaya untuk mengatasi masalah *Stunting* adalah inovasi di bidang gizi yang dilakukan oleh desa. Program inovasi ini mempunyai tujuan utama menekan angka *Stunting* dengan kelompok sasaran berisiko *Stunting* yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita. Dengan adanya inovasi di bidang gizi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu dengan balita. Menurut Anggraeni (2013) tentang inovasi kesehatan di Puskesmas, menyatakan bahwa inovasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan. *Stunting* hanya dapat ditangani secara optimal melalui kolaborasi, koordinasi dan konvergensi intervensi yang multisektoral. Oleh karena itu penguatan kolaborasi, peran, dan kontribusi elemen yang didalamnya meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi dan peneliti, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat merupakan hal yang esensial untuk memastikan pendekatan multisektoral tersebut.

Kabupaten Situbondo terpilih sebagai salah satu wilayah yang mendapat intervensi penanganan penurunan *Stunting* pada tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI. Sementara secara akumulatif angka *Stunting* di Kota Santri ini tercatat juga tinggi. Yakni berada pada angka 26,74 persen. "Angka *Stunting* ini tinggi, secara kumulatif tingkat Kabupaten 26,74. Dinkes membahas secara detail melalui Rembuk *Stunting*. Namun memang perlu dikaji terlebih dulu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)." Paling tidak diarahkan untuk penanganan *Stunting*. Khususnya bagi gizi buruk kaum dhuafa, barangkali desa menyediakan makanan yang memiliki gizi bernilai tinggi. Untuk perencanaan intervensi dari Kementerian Kesehatan RI.

Berdasarkan data pada 2022, angka prevalensi *stunting* Situbondo berjumlah 3.006 dengan persentase 8,35%, pada 2023 atau penurunannya mencapai 5,55% dari jumlah *Stunting* 2.193. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1.938 orang dengan persentase mencapai 5,1%. Angka ini sudah melampaui target nasional 2024

yakni 14 persen. Keberhasilan menurunkan prevalensi stunting Situbondo tak lepas dari kerja bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, seperti Dinas Kesehatan terlibat penurunan angka stunting mengenai gizi, mulai dari ibu hamil hingga balita, sedangkan Dinas PUPP terkait dengan jamban keluarga, sanitasi dan rumah tidak layak huni.

Kabupaten Situbondo masuk ke dalam sepuluh besar kabupaten prioritas dalam penanganan *Stunting*, pasalnya dapat dilihat bahwa prevelensi *Stunting* Kabupaten Situbondo yang masih cukup tinggi, Dengan adanya hal tersebut pemerintah kabupaten Situbondo terus menggencarkan program-program dalam upaya penurunan *Stunting*. Hal dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Di pasal 3 kebijakan tersebut, disebutkan bahwa penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, dalam implementasi penanggulan *Stunting* tersebut juga dibentuk penguatan kelembagaan dan kerjasama yang tidak hanya dapat dilakukan secara sectoral akan tetapi membutuhkan kerjasama dan dukungan dengan sektor dan program lain dalam hal ini kerjasama antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo tersebut. (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*)

Peningkatan dan penurunan angka *Stunting* dari tahun ketahun di setiap desa di wilayah Kecamatan Panji Situbondo. Hal tersebut juga membuktikan bahwa wilayah Situbondo merupakan salah satu wilayah yang angka *Stunting*nya perlu di perhatikan. Maka dari itu pemerintah wilayah naungan Kecamatan Panji Situbondo sudah menjalankan program pemerintah tentang penurunan angka *Stunting*. Upaya yang dilakukan meliputi program edukasi bagi calon pengantin, edukasi bagi pengantin baru, pengontrolan rutin per bulan untuk ibu hamil, pengontrolan 1000 hari pertama untuk anak yang baru dilahirkan, pemberian makanan tambahan untuk anak, pemeriksaan rutin untuk anak yang terindikasi *Stunting*, serta pemberian vitamin untuk anak. Program-program tersebut diharapkan dapat menurunkan angka *Stunting* di Kecamatan Panji tersebut.

Masih terdapat kekurangan dan kesenjangan masalah kesehatan yang makin kompleks di Desa dalam naungan Kecamatan Panji Situbondo seperti belum efektifnya program-program pencegahan *Stunting* dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan. Dengan adanya kekurangan dalam hal program penurunan *Stunting* memicu kurang maksimalnya target yang diinginkan pemerintah dalam program tersebut. Hal ini tentunya disebabkan oleh bebrera kendala yang terjadi di lapangan seperti belum efektifnya program-program pencegahan *Stunting* dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan. Maka dari itu, upaya strategis perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut terutama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang harus didukung oleh kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan hingga di tingkat desa dengan interelasi, interaksi, dan keterpaduan berbagai upaya yang dilakukan.

Dari pemasalahan tersebut pihak Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo mempunyai beberapa strategi penurunan stunting melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk perbaikan gizi, kesehatan, lingkungan, dan perilaku. Ini melibatkan pemberian ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat, peningkatan sanitasi dan air bersih, serta edukasi gizi. Selain itu, strategi nasional mencakup komitmen politik, konvergensi program, dan pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Strategi Penurunan Stunting di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”**.

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada sebuah perbaikan yang ingin dilakukan yang kemudian diterapkan untuk melakukan penelitian pada kondisi lingkungan terjadinya sebuah masalah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimana data yang nantinya akan diperoleh berbentuk sebuah cerita, kata-kata atau gambar yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan sehingga pembaca dapat memahami informasi yang diberikan dengan mudah (Sugiyono 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan sebuah penelitian tentang individu/perorangan, organisasi.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Panji Situbondo yang terletak di Jl. Semeru No.1, Mimbaan Tengah, Mimbaan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah ditentukan. Penentuan waktu penelitian juga sangat penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Sebab dengan ditentukannya waktu dalam penelitian maka memberikan target dalam penyelesaian penelitian. Waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan yaitu pada tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016:137). Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan.

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya". Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung. Bentuk pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:145). Objek observasi pada penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Panji Situbondo.

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari Kecamatan Panji Situbondo

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, kondisi *Stunting* baru terlihat setelah bayi berusia dua tahun (TNP2K, 2017).

Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2016:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan Pengumpulan Data, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kecamatan Panji dalam Penurunan *Stunting*

Strategi penurunan *stunting* di Situbondo melibatkan pendekatan terintegrasi yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif, serta pemanfaatan aplikasi Si Besti untuk pemantauan dan informasi. Intervensi spesifik bertujuan mengatasi penyebab langsung seperti kurang gizi, sementara intervensi sensitif menangani faktor faktor tidak langsung yang mempengaruhi gizi, seperti sanitasi, air bersih, dan ekonomi masyarakat.

1. Melaksanakan teknis intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK.

Melaksanakan intervensi teknis yang ditujukan kepada anak dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan langkah strategis dan krusial dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak sejak dini. Intervensi ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Pelaksanaan kelas ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemeriksaan ANC (Antenatal Care). Kementerian Kesehatan RI. (2021) Program ini dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan pendekatan ekohort, di mana data dan informasi terkait kesehatan ibu hamil dibagikan secara terstruktur untuk memfasilitasi pelaporan dan pertukaran informasi antar sesama. Dengan pendekatan ini, ibu hamil dapat lebih memahami peran pemeriksaan rutin dan pemenuhan gizi dalam menjaga

kesehatan selama kehamilan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi.

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa Pelaksanaan program intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang optimal. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang, guna mendukung tumbuh kembang janin yang sehat. Program ini dilaksanakan di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Petugas posyandu telah berhasil memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan anemia selama kehamilan. Selain itu, kami juga aktif berkolaborasi dengan pihak puskesmas untuk melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil terkait pentingnya kesehatan ibu dan janin, serta cara-cara menjaga kesehatannya selama masa kehamilan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi TTD dan pemantauan kesehatan secara berkala berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan dari informan kunci, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program intervensi pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah berjalan dengan baik, dengan fokus pada kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Program ini melibatkan kerjasama antara berbagai instansi, tenaga kesehatan, serta keluarga anak, yang semuanya bekerja bersama untuk memastikan keberhasilan intervensi. Kolaborasi yang terjalin memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan penyampaian informasi yang lebih akurat kepada keluarga, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap tumbuh kembang anak di masa awal kehidupannya. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya terfokus pada satu pihak saja, melainkan melibatkan seluruh elemen yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

Puskesmas telah melaksanakan program pemberian gizi untuk ibu hamil guna mendukung kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, dalam rangka mendukung keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, dilakukan kegiatan pendampingan keluarga yang melibatkan lintas sektor gabungan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020) Program ini dilaksanakan setiap bulan dengan sasaran calon pengantin (catin), ibu hamil, dan anak baduta (bayi dibawah dua tahun) yang berada di masing-masing kelurahan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik, serta memberikan edukasi tentang pentingnya gizi yang seimbang dan perawatan selama masa kehamilan dan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka *stunting* di daerah tersebut.

Kecamatan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan memberikan sosialisasi pencegahan *stunting* kepada kader dan orang tua di kelurahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian susu ibu hamil kepada ibu hamil dan menyusui. BKKBN 2022 Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya pencegahan *stunting* pada anak. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memastikan kesehatan ibu dan anak yang optimal

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pernyataan informan pendukung di atas, dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan program intervensi kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh seluruh pernyataan informan utama dan informan kunci yang mengkonfirmasi bahwa sosialisasi terkait program tersebut telah dilakukan secara intensif di lapangan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya intervensi yang tepat pada periode 1.000 HPK, sebagai upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan program ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program intervensi tersebut.

2. Melaksanakan kegiatan intervensi kegiatan gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7- 23 bulan tentang pemberian MP- ASI

Pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berusia 7 hingga 23 bulan difokuskan pada edukasi dan pendampingan dalam pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang tepat. Masa ini merupakan fase krusial dalam tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan gizi meningkat dan tidak dapat lagi dipenuhi hanya dari ASI. Oleh karena itu, intervensi dilakukan untuk memastikan ibu memiliki pemahaman yang benar mengenai jenis, porsi, frekuensi, serta cara pengolahan MP-ASI yang aman dan bergizi. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, demonstrasi pembuatan MP-ASI, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Melalui intervensi ini, diharapkan tercapai peningkatan status gizi anak serta pencegahan risiko kekurangan gizi, terutama stunting, pada kelompok usia rentan.

Pelaksanaan program MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) bagi bayi usia 7-23 bulan telah dilaksanakan dengan memberikan PMT (Paket Makanan Tambahan) berupa susu kepada masyarakat yang memiliki balita *stunting*. menurut Kementerian Kesehatan RI Program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi balita, mencegah kekurangan gizi, dan membantu penurunan angka *stunting* di Indonesia. Pemberian susu sebagai PMT merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan status gizi balita *stunting*, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang mereka.

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa pelaksanaan program intervensi kegiatan gizi spesifik yang menyasar ibu menyusui dan anak berusia 7-23 bulan terkait pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) telah berjalan sesuai dengan rencana. Program ini telah direalisasikan melalui kegiatan pemberian makanan tambahan yang bergizi serta pelaksanaan pos gizi di lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak balita, khususnya dalam masa transisi dari ASI eksklusif ke MP-ASI, guna mencegah terjadinya masalah gizi seperti *stunting* dan gizi kurang. Keberadaan pos gizi di lingkungan masyarakat juga berfungsi sebagai wadah edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, serta tempat konsultasi bagi ibu menyusui terkait praktik pemberian MP-ASI yang tepat dan sesuai dengan anjuran gizi seimbang.

Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) tidak termasuk dalam indikator kinerja gizi, namun Dinas Kesehatan tetap berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini menekankan pentingnya pemberian MP-ASI yang adekuat mulai usia 6 bulan, setelah masa ASI eksklusif, dan dilanjutkan bersama ASI hingga anak berusia 2 tahun untuk mendukung tumbuh kembang optimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 51 Tahun 2016.

Pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

program intervensi kegiatan gizi spesifik yang menasar ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan, khususnya dalam hal pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), telah dijalankan melalui kegiatan sosialisasi di lapangan. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MP-ASI yang tepat guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat upaya peningkatan gizi di tingkat masyarakat, meskipun masih diperlukan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutannya.

Dari hasil wawancara petugas RPG dapat dijelaskan bahwa penyuluhan kesehatan telah terlaksana secara efektif di masing-masing posyandu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup edukasi mengenai gizi seimbang, imunisasi, dan perawatan kesehatan ibu dan anak. Seluruh kegiatan berjalan lancar dengan partisipasi aktif dari kader posyandu serta masyarakat setempat, yang menunjukkan tingginya kesadaran akan pentingnya informasi kesehatan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022) penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat masyarakat guna mendukung program kesehatan preventif di tingkat desa.

Petugas posyandu pelaksanaan program pos gizi selama 6 bulan dengan maksimal 12 hari per bulan untuk anak terindikasi *stunting* telah terlaksana dengan baik. Program ini melibatkan pemantauan status gizi anak secara rutin, serta pemberian makanan tambahan untuk membantu meningkatkan asupan gizi mereka. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mencegah *stunting* dan mendukung tumbuh kembang anak agar lebih optimal. Selama periode tersebut, keluarga dan tenaga kesehatan dilibatkan dalam edukasi gizi untuk memastikan keberlanjutan dampak positif yang dihasilkan. Data terkait efektivitas program dapat diakses melalui laporan pos gizi di fasilitas kesehatan setempat berdasarkan Program Pos Gizi Kesehatan Anak, Dinas Kesehatan (Situbondo).

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program intervensi kegiatan gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7-23 bulan telah dilaksanakan dengan baik di lapangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu menyusui dan anak-anak pada rentang usia tersebut, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari informan utama yang menyebutkan bahwa kegiatan pos gizi di lapangan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dimana ibu menyusui dan anak-anak mendapatkan informasi serta dukungan terkait pola makan yang sehat dan bergizi.

3. Penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang memiliki balita *stunting*

Pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita *stunting* telah dilaksanakan dengan memberikan makanan tambahan di lapangan. Namun, terkait dengan jaminan kesehatan melalui BPJS, meskipun sudah ada, masih perlu penguatan agar penerima manfaat dapat lebih maksimal merasakan manfaat dari program tersebut. Bantuan untuk anak *stunting*, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), merupakan langkah penting dalam menangani masalah gizi. Namun, untuk jaminan sosial, seperti bantuan kesehatan atau jaminan sosial lainnya, itu bukan ranah puskesmas. Puskesmas lebih fokus pada pelayanan kesehatan dasar, termasuk penanganan gizi buruk dan *stunting*. Jaminan sosial umumnya ditangani oleh lembaga pemerintah terkait seperti BPJS Kesehatan atau program-program

bantuan sosial lainnya yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait jaminan sosial di Indonesia.

Puskesmas telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung penanggulangan *stunting*, di antaranya pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan susu bagi balita yang mengalami *stunting*. Selain itu, untuk jaminan sosial, BPJS Kesehatan juga mencakup layanan bagi balita *stunting*. Bantuan lainnya, seperti asuhan, pos gizi, dan PMT, telah diimplementasikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki status gizi anak. Semua program ini bertujuan untuk mengurangi angka *stunting* dan memastikan kesehatan balita terjaga berdasarkan Data program Puskesmas setempat dan kebijakan kesehatan pemerintah terkait percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita *stunting* telah dilaksanakan dengan memberikan makanan tambahan di lapangan. Namun, terkait dengan jaminan kesehatan melalui BPJS, meskipun sudah ada, masih perlu penguatan agar penerima manfaat dapat lebih maksimal merasakan manfaat dari program tersebut.

Petugas posyandu mengatakan bahwa anak yang *stunting* mendapatkan bantuan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan juga berperan penting dalam penanganan *stunting* dengan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, persalinan, dan pasca persalinan. BPJS Kesehatan menanggung biaya pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita, termasuk skrining hipotiroid kongenital dan imunisasi rutin.

Pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita *stunting* telah dilaksanakan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan dinas sosial. Dalam program ini, BPJS Kesehatan diberikan langsung kepada keluarga dengan balita *stunting* sebagai upaya untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik. Kerja sama yang solid antara berbagai pihak ini bertujuan untuk menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pelaksanaan bantuan jaminan sosial untuk penurunan *stunting* bukan merupakan ranah lintas sektor dalam program tersebut. Kami belum dapat memastikan apakah bantuan ini sudah terlaksana atau belum, karena hal itu menjadi tanggung jawab pihak lain. Jaminan sosial umumnya ditangani oleh lembaga pemerintah terkait seperti BPJS Kesehatan atau program-program bantuan sosial lainnya yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait jaminan sosial di Indonesia

SK penurunan *stunting* melalui tim TPPS untuk berkolaborasi dalam memastikan jaminan akses kesehatan dan gizi bagi balita yang mengalami *stunting*. Dalam upaya ini, TPPS berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program yang terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat, guna memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi prevalensi *stunting*. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan dapat terwujud penurunan *stunting* yang signifikan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada balita dan ibu hamil sebagai sasaran utama berdasarkan K Penurunan *Stunting* (Peraturan Presiden

No. 72 Tahun 2021). Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita *stunting* telah dilaksanakan dengan baik di lapangan. Berdasarkan pernyataan informan pendukung, dapat disimpulkan bahwa program ini sudah efektif memberikan dukungan kepada keluarga dengan balita *stunting*, memastikan mereka menerima bantuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi gizi dan kesejahteraan anak-anak mereka.

4. Pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga

Kegiatan ini meliputi edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, termasuk praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), serta pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang. Puskesmas telah melaksanakan pembentukan Pos Gizi di Posyandu sebagai upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Kegiatan ini meliputi edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, termasuk praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), serta pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang. Upaya ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang menekankan intervensi spesifik di tingkat keluarga dan masyarakat menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk meningkatkan gizi keluarga ada namanya pos gizi dengan kolaborasi bersama pihak puskesmas dan para kader. Pos Gizi merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan gizi keluarga di tingkat masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Puskesmas, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Pos Gizi berfungsi sebagai wadah edukasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta pemberian makanan tambahan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas memberikan pendampingan teknis dan medis, sementara kader Posyandu bertugas sebagai ujung tombak di lapangan dalam mengajak serta membina keluarga agar lebih peduli terhadap asupan gizi anak. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* dan gizi buruk, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit dan Kondisi Khusus. Dengan adanya Pos Gizi, diharapkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dapat dipaparkan bahwa telah melaksanakan program intervensi gizi dengan berkolaborasi bersama Puskesmas dan kader-kader Posyandu melalui pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendirian pos gizi, serta edukasi kepada orang tua dan kader tentang pentingnya gizi seimbang bagi balita. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan status gizi anak di wilayah binaan menurut Kementerian Kesehatan RI (Permenkes No. 51 Tahun 2016 tentang Standar PMT Lokal dan Pedoman Pelaksanaan Gizi di Masyarakat). Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa Program peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga telah dilaksanakan melalui kegiatan pos gizi dan edukasi pola asuh yang baik. Seluruh informan utama mendukung upaya ini, dengan menegaskan pentingnya pemberian edukasi langsung di lapangan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pola asuh yang mendukung perbaikan gizi keluarga.

Strategi kebijakan publik

Strategi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Sipayung (2019) yang isinya mencangkup variabel-variabel berikut:

1. Sasaran Kebijakan

Standar dan kebijakan dalam penelitian ini adalah target yang harus dicapai oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam kelancaran program ini. Apabila pemerintah tidak mampu menentukan sasaran yang akan dituju maka program yang telah disusun dengan sedemikian rupa tidak akan berjalan dengan baik. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang tujuan ataupun sasaran yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten Situbondo dalam keberlangsungan program ini:

Masa ini dianggap krusial karena merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat menentukan kualitas kesehatan jangka panjang. Namun, pendekatan pencegahan yang komprehensif juga mencakup sasaran yang lebih luas, seperti remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu menyusui, dan balita. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesiapan sejak dini dalam hal pengetahuan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesiapan menjadi orang tua, guna menekan risiko stunting dari hulu ke hilir. 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) menekankan bahwa periode sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun merupakan masa kritis untuk mencegah stunting. Gizi yang tidak adekuat dalam masa ini dapat menyebabkan dampak permanen pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Hal ini mendukung pernyataan dari Andi Jaka Setiawan bahwa prioritas utama adalah ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun.

Adanya keselarasan dan pelengkap strategi dalam pencegahan stunting. Fokus pada 1000 HPK sangat penting, namun edukasi dan intervensi juga perlu dimulai lebih awal melalui peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan stunting secara holistik dan berkelanjutan.

Dari informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran program *stunting* ini adalah ibu hamil, anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu menyusui dan balita. Dengan tujuan masyarakat dengan pemerintah setempat mampu berkolaborasi dalam mensukseskan program ini. Apabila masyarakat mendukung penuh program yang diadakan pemerintah, maka hal tersebut akan mempermudah pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan target penurunan *stunting* turun hingga 14%.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud merupakan sumber daya manusia serta sumber daya finansial dalam melaksanakan program. Sumber daya manusia adalah elemen paling penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sumber daya manusia disini merupakan pemerintah serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini. Tanpa adanya pemerintah dan masyarakat yang kompak maka program tidak mampu berjalan dengan baik. Selain hal tersebut sumber daya finansial merupakan salah satu elemen yang mampu menggerakkan suatu program. Seperti yang kita tau bahwa setiap manusia membutuhkan uang dalam melaksanakan pergerakannya. Dikarenakan ini merupakan program pemerintah maka finansial yang dibutuhkan dalam keberlangsungan program didukung penuh oleh pihak pemerintah, Sumber daya yang tidak kalah penting adalah ketepatan waktu terkadang manusia sibuk sehingga mengesampingkan urusan yang kurang menguntungkan di dalam jangka waktu dekat. Pada program ini sangat memiliki ketepatan waktu dalam menjalankan programnya sehingga dapat di terima dengan baik oleh masyarakat.

Penyuluhan dari UPT Puskesmas memberikan informasi penting seputar kesehatan ibu dan janin, termasuk pemenuhan gizi yang tepat selama kehamilan. Ini sangat relevan dengan pencegahan stunting karena masa kehamilan termasuk dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) periode emas yang sangat menentukan tumbuh kembang anak. Penyuluhan tentang gizi dan kesehatan pada ibu hamil termasuk dalam kategori intervensi gizi spesifik, yang secara langsung menargetkan penyebab utama stunting seperti kurangnya asupan zat gizi mikro (seperti zat besi, asam folat, dan kalsium). Ketika ibu hamil mendapatkan pengetahuan ini, mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi harian yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin yang optimal. Ini mendukung prinsip bahwa program intervensi akan lebih berhasil bila memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat, sehingga ibu-ibu lebih termotivasi untuk hadir dan menyerap informasi. Adanya unsur “diwajibkan” dalam kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa program ini memiliki kebijakan atau aturan pelibatan ibu hamil, namun yang menarik adalah adanya kesadaran intrinsik dari ibu untuk ikut secara aktif karena menyadari pentingnya informasi tersebut bagi masa depan anaknya.

3. Karakteristik Organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi sangat berperan penting dalam menjalin komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak. Dengan adanya kemampuan karakteristik yang baik dan sesuai dengan masyarakat sekitar akan mempermudah pemangku kepentingan dalam menjalankan program. Dalam penelitian yang telah dilakukan karakteristik yang dimiliki oleh petugas program mampu diterima dengan baik sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik antara petugas dan sasaran hal ini di buktikan dengan beberapa pendapat.

Keikutsertaan ibu hamil dalam layanan posyandu secara rutin, dengan bimbingan yang komunikatif dan ramah dari petugas, sangat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran ibu akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan janin. Hal ini menjadi salah satu upaya konkret dalam pencegahan dan penurunan stunting sejak masa kehamilan, yang merupakan periode krusial dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Rutin mengikuti posyandu saat hamil menunjukkan adanya akses dan kepatuhan ibu terhadap layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kehamilan, pemantauan berat badan, tekanan darah, serta edukasi gizi. Hal ini sangat penting dalam mencegah kekurangan gizi ibu hamil yang bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, salah satu faktor risiko utama stunting.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif ibu hamil dalam layanan posyandu, ditunjang oleh pelayanan yang komunikatif dan mendukung dari petugas kesehatan, menjadi kunci penting dalam mencegah stunting sejak dini. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya memberikan intervensi medis, tetapi juga membangun kesadaran dan semangat ibu dalam menjaga kesehatan kehamilan dan masa depan anak.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah setempat dalam memastikan program posyandu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pembinaan dan pengawasan tersebut menjadi bentuk dukungan aktif dari pihak kecamatan, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan posyandu sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat. Antusiasme warga terhadap program ini juga menjadi indikator positif bahwa kegiatan posyandu telah diterima dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan ibu dan anak. Peran aktif Kecamatan Panji dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan posyandu. Respons positif masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Keberhasilan suatu program

kesehatan masyarakat, seperti posyandu, tidak hanya bergantung pada pelaksana di lapangan, tetapi juga pada dukungan dan pengawasan dari pemerintah setempat.

4. Komunikasi

Komunikasi sayang berperan penting dalam segala kegiatan karena dengan adanya komunikasi yang baik akan mempermudah dalam melakukan kegiatan. Maka dalam program ini pemerintah sangat berperan penting dalam menjalin komunikasi yang baik dengan para masyarakat. Sehingga program ini akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Program ini dapat dikatakan salah satu program yang mampu menjalin komunikasi yang baik antara petugas program dan masyarakat hal ini di buktikan dengan beberapa pendapat yang mendukung.

Keikutsertaan aktif ibu dalam kegiatan posyandu menjadi salah satu upaya penting dalam pemantauan dan pencegahan stunting pada balita. Kegiatan posyandu tidak hanya menyediakan layanan pemeriksaan rutin, tetapi juga memberikan pengarahan, edukasi, dan intervensi kesehatan seperti vitamin dan obat cacing. Ini membuktikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar yang teratur sangat berperan dalam menjaga tumbuh kembang anak agar tetap optimal dan mencegah terjadinya stunting. Konsistensi mengikuti posyandu dan peran aktif petugas kesehatan dalam memberikan layanan serta edukasi, sangat mendukung upaya penurunan stunting di tingkat desa. Keterlibatan langsung ibu dalam pemantauan tumbuh kembang balita serta penerimaan layanan kesehatan rutin menjadi bagian dari solusi nyata untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang sehat dan bebas stunting.

Camat Panji menekankan bahwa penurunan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi medis, tapi juga memerlukan pendekatan edukatif yang membangun kemandirian keluarga dalam memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak. Kemandirian ini mencakup kemampuan keluarga untuk mengenali, mencegah, dan merespons masalah gizi secara mandiri di rumah. Program edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan langsung seperti penyuluhan, posyandu, dan program calon pengantin (catin).

Masyarakat, terutama calon ibu dan calon pengantin, sangat positif karena mereka menyadari manfaat langsung bagi masa depan anak mereka. Posyandu tidak hanya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan, tapi juga menjadi wadah pengingat dan pengedukasi masyarakat, terutama soal gizi dan pertumbuhan anak balita. Ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dan langsung menyentuh masyarakat akar rumput sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi sejak dini.

Strategi utama dalam pencegahan stunting di Posyandu Battal dilakukan melalui pendekatan edukatif berbasis kemandirian keluarga, di mana keluarga dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan menangani masalah kesehatan secara mandiri. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan terintegrasi, dengan pendampingan dari tenaga kesehatan dan penyuluh masyarakat. Pendekatan ini memperkuat posisi keluarga sebagai aktor utama dalam menjaga tumbuh kembang anak, bukan hanya sebagai penerima informasi. Pendekatan berbasis kemandirian keluarga yang dilakukan secara terstruktur dan didampingi menjadi pilar penting dalam menurunkan angka stunting. Melalui pemberdayaan keluarga yang disertai edukasi berkelanjutan dan pendampingan yang intensif, masyarakat mampu mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan anak-anak mereka secara mandiri, sehingga mencegah stunting sejak dini dengan lebih efektif.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap yang dimiliki petugas pelaksana harus sesuai dengan kultur dan budaya yang terjadi di masyarakat sasaran. Dalam program ini pemerintah mensiasati para petugas atau para kader dari daerah yang menjadi sasaran sehingga mempermudah petugas dalam menyesuaikan diri sehingga dapat diterima dengan baik. Selain itu para pelaksana dalam kegiatan ini memiliki kecocokan yang sesuai dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang dituju.

Pendekatan edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga menjadi strategi yang efektif dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Panji. Edukasi ini tidak hanya diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga mampu membangun kesadaran dan semangat dari kelompok sasaran utama, yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dukungan langsung dari tenaga kesehatan yang ramah dan komunikatif di posyandu semakin memperkuat motivasi ibu,

Kunci keberhasilan penurunan stunting terletak pada edukasi yang mendorong kemandirian keluarga. Artinya, keluarga dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengidentifikasi kebutuhan gizi dan kesehatan anak serta bertindak secara mandiri, tidak hanya mengandalkan intervensi dari luar. Edukasi ini disebut "sangat diterima dengan baik" oleh masyarakat, menunjukkan bahwa pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial warga. Kelompok sasaran seperti calon pengantin dan ibu hamil bahkan menunjukkan antusiasme tinggi, karena mereka mulai menyadari bahwa investasi kesehatan sejak sebelum anak lahir akan berdampak besar pada masa depan anak mereka. Strategi yang disampaikan oleh camat selaras dengan perilaku nyata masyarakat, seperti yang dilakukan Siti Rohma. Ini menunjukkan bahwa Kebijakan dan program pemerintah terimplementasi dengan baik di tingkat desa. Masyarakat merespons secara aktif, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam menurunkan prevalensi stunting.

Pernyataan dua narasumber secara bersama-sama menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat. Melalui edukasi yang mendorong kemandirian keluarga serta pelayanan posyandu yang ramah dan informatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari solusi dalam menciptakan generasi anak Indonesia yang sehat dan bebas stunting.

Partisipasi aktif dalam posyandu sangat penting dalam upaya menurunkan stunting. Melalui posyandu, ibu-ibu mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai perawatan dan kesehatan balita, termasuk pemenuhan imunisasi yang merupakan salah satu faktor utama pencegahan stunting. Posyandu berfungsi sebagai wadah utama edukasi, pemantauan, dan pemberian intervensi kesehatan pada balita yang sangat efektif dalam menurunkan stunting. Dengan peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi dan perawatan anak serta adanya pemeriksaan rutin, risiko stunting dapat diminimalisir secara signifikan. Program posyandu yang wajib dan terjadwal mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini sehingga membantu pemerintah dan tenaga kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Peran lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berperan penting dalam keberlangsungan program dimana lingkungan yang baik dan mampu menerima program akan mempermudah segala proses yang akan terjadi. Maka dalam menjalankan program ini pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan pemerintah sasaran yang dituju. Salah satu lingkungan yang mampu menerima

program ini dengan baik adalah masyarakat yang mau ikut serta dalam menyukseskan program serta memperoleh keuntungan yang di targetkan oleh pemerintah. Hal ini berjalan dengan baik karena keinginan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar dibuktikan oleh beberapa pengakuan masyarakat berikut.

Program pencegahan stunting di Kecamatan Panji dilaksanakan dengan pengawasan dan pembinaan yang serius dari pemerintah daerah dan instansi kesehatan, yang melibatkan kerja sama lintas sektor. Sementara itu, masyarakat, khususnya ibu hamil, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program edukasi kesehatan yang diberikan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi kunci utama keberhasilan upaya menurunkan angka stunting melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Panji dilaksanakan dengan pendekatan yang melibatkan semua lapisan pemerintah serta masyarakat, dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati untuk memastikan keterlibatan perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, serta keluarga dalam keberhasilan program tersebut. Bupati memiliki peran penting dalam mendorong pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan stunting, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, termasuk perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan desa, terlibat aktif dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan program pencegahan stunting juga sangat bergantung pada dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, Fenty menegaskan bahwa peran keluarga, terutama ibu sebagai pengasuh, sangat krusial dalam memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak serta mengikuti program-program kesehatan yang telah disediakan. Pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Panji dijalankan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, perangkat daerah, kecamatan, dan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati bertujuan untuk meningkatkan peran serta semua pihak terkait dalam menyukseskan program ini. Tidak hanya itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan program, karena mereka adalah aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam hal pemberian gizi yang tepat serta pemantauan kesehatan anak.

Pengawasan dan pembinaan langsung oleh pihak pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan, berdampak positif terhadap pelaksanaan program posyandu dan pencegahan stunting di masyarakat. Kehadiran pemimpin daerah dalam kegiatan langsung di lapangan meningkatkan semangat warga dan efektivitas program. Pengawasan dan pembinaan langsung dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten (oleh Bupati) maupun kecamatan, memainkan peran penting dalam mendorong keberhasilan program posyandu dan penanggulangan stunting. Kehadiran langsung pejabat pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol, tetapi juga memberikan penguatan moral dan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Antusiasme warga yang tinggi terhadap program ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan baik, dan merupakan fondasi penting dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah seperti Kecamatan Panji.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada maka dapat diambil kesimpulan Strategi Pemerintah dalam Penurunan *Stunting*

yaitu 1) Melaksanakan teknis intervensi yang ditujukan kepada anak dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan langkah strategis dan krusial dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak sejak dini. Intervensi ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun 2) Melaksanakan kegiatan intervensi kegiatan gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berusia 7 hingga 23 bulan difokuskan pada edukasi dan pendampingan dalam pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang tepat. Masa ini merupakan fase krusial dalam tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan gizi meningkat dan tidak dapat lagi dipenuhi hanya dari ASI. 3) Penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang memiliki balita *Stunting* yaitu pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita *Stunting* telah dilaksanakan dengan memberikan makanan tambahan di lapangan. Namun, terkait dengan jaminan kesehatan melalui BPJS, meskipun sudah ada, masih perlu penguatan agar penerima manfaat dapat lebih maksimal merasakan manfaat dari program tersebut. 4) Pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga yaitu melaksanakan pembentukan Pos Gizi di Posyandu sebagai upaya pencegahan dan penanganan *Stunting*. Kegiatan ini meliputi edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, termasuk praktik pemberian makan bayi dan anak (PMT), serta pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang. Upaya ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* yang menekankan intervensi spesifik di tingkat keluarga dan masyarakat menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Awan Y., Abdoellah, & Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Alwi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniasih, E., et al., 2010. *Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang*. Jakarta : PT Gramedia.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Siswati, T. 2018. *Stunting*. Yogyakarta: Husada Mandiri Poltekkes Kemenkes
- Solahudin, Kusumanegara. 2010. *Model Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.

- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2018. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- UNICEF. 2013. *Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global*
- Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widodo, Joko. 2017. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Anggraeni, Cindy. 2013. Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Iogir: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1, no. 1.
- Erik et al. 2020. *Stunting Pada Anak Usia Dini (Study Kasus di Desa Mirat Kec Lewimunding Majalengka)*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), pp. 24– 36.
- Faturahman, B. M. 2018. *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya
- Hafid, Risma. 2016. *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*, Skripsi : Universitas Hasanudin Makassar
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2016. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11(01), 1–12.
- Sipayung, R.S., 2019. *Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Kontruksi Banguna Di Kota Yogyakarta*. S1 thesis, UAJY.
- Sukanti, dan Nur Faidati. 2021. *Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman*. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 91-113
- Wulandari, S. 2017. *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Hasanudin Makasar. Makasar.
- Kemenkes RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaa Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Kemenkes.
- Kemenkes. 2018. *Anak. Panduan Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Desa